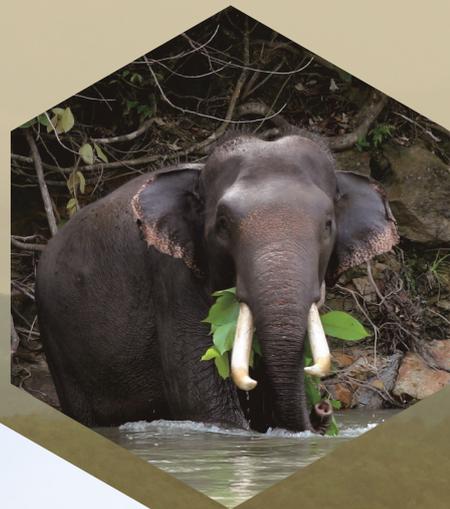


RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF

PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN HABITAT GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA



RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF

PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN HABITAT GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA



**RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF
PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN GAJAH
DI KABUPATEN ACEH JAYA**

Disusun di Banda Aceh

Pada tanggal :

Oleh

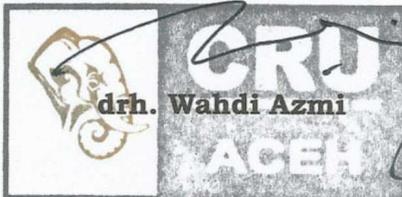
1. Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.
2. Andoko Hidayat, S. Hut., MP
3. Fajri, SP., M.Si.
4. Tutia Rahmi, S.Hut
5. drh. Wahdi Azmi
6. Fithria Edhi, SP., M.Si.
7. Rahmat Diansyah, S.Pd
8. Yusuf Iswantoro, S.Hut

DISAHKAN

Pada tanggal :

Oleh

Direktur CRU Aceh



Kepala BKSDA Aceh

Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19760522 200003 1 002

Kepala KPH Wilayah I Aceh

Fajri, SP., M.Si
NIP. 19741127 200003 1 002

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana hasil dari survei lapangan dan kondisi saat ini, sebagian wilayah KPH I, tepatnya di Kabupaten Aceh Jaya merupakan habitat bagi satwa liar yang dilindungi serta penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, regional dan global yaitu gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Diperkirakan jumlah gajah liar yang ada di Kabupaten Aceh Jaya adalah berjumlah 68 – 72 individu. selain gajah, juga terdapat satwa yang dilindungi antara lain harimau Sumatera, kijang, kancil, beruang madu, rangkong, dan satwa liar lainnya. nilai penting lainnya yaitu pelestarian plasma nutfah untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan cinta alam dan wisata alam.

Dari hasil diskusi dan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa isu strategis dalam pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya, yaitu: (1) belum optimalnya peran Conservation Response Unit (CRU) Sampoinet sebagai unit pengelolaan tingkat tapak; (2) masih terjadinya konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, berdasarkan data kejadian konflik gajah dan manusia di Kabupaten Aceh Jaya, tercatat 90 (Sembilan puluh) kali konflik terjadi, atau rata-rata terjadi 9 (sembilan) kali konflik dalam setiap tahunnya; (3) pengelolaan habitat gajah belum terpadu; dan (4) dibutuhkan sinergitas multipihak dalam mengelola kawasan yang menjadi habitat gajah di Kabupaten Aceh Jaya.

Dari uraian nilai penting kawasan dan isu strategis yang ada di lapangan, maka kondisi yang diinginkan untuk kedepan adalah (1) gajah liar yang berkonflik dapat kembali ke habitat alaminya; (2) adanya respon cepat terhadap konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya; (3) intensitas konflik antara manusia dan gajah liar yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dapat menurun; (4) CRU Sampoinet dapat mandiri dalam segi kelembagaan dan bekerja secara optimal dalam penanganan konflik antara manusia dan gajah liar; dan (5) meningkatnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya.

Memperhatikan nilai penting kawasan, isu strategis dan pengembangan wilayah, maka visi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya, maka visi pengelolaan kawasan adalah “Terwujudnya Kolaborasi Pengelolaan Habitat Gajah untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan misi yaitu (1) mewujudkan kolaborasi pengelolaan habitat gajah; (2) beroperasinya CRU Sampoinet secara mandiri, baik dalam segi kelembagaan maupun dalam penanganan konflik; (3) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti penting keberadaan gajah; dan (4) meminimalisir tingkat konflik antara manusia dan gajah liar yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan visi dan misi pengelolaan, maka tujuan pengelolaan kawasan perlindungan gajah di kabupaten Aceh Jaya adalah (1) meningkatkan sinergitas para pihak dalam rangka pengelolaan habitat gajah; (2) meningkatkan sumberdaya CRU Sampoinet dalam rangka terwujudnya CRU yang mandiri dan optimal dalam rangka penanganan konflik; (3) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi



gajah dan habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya; dan (4) meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Kolaboratif ini dilakukan melalui beberapa tahapan proses kegiatan yaitu berupa pembentukan tim penyusun; penentuan tujuan pengelolaan; penyusunan strategi dan rencana kegiatan; penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi; pembahasan para pihak; dan penyusunan dokumen.

Kami mengharapkan kritik dan saran terhadap penyusunan dokumen yang telah kami buat untuk dapat disempurnakan lebih lanjut dan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya ini dari awal sampai akhir.

Banda Aceh, April 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

RINGKASAN EKSEKUTIF..... i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

1. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Informasi Umum..... 1

1.1.1. Letak, Luas dan Lokasi Kawasan..... 1

1.1.2. Risalah Kawasan..... 2

1.1.3. Aksesibilitas..... 4

1.1.4. Kondisi Fisik..... 4

1.1.5. Potensi Kawasan..... 8

1.1.6. Sosial, Ekonomi dan Budaya..... 10

1.2. Kondisi Saat Ini..... 12

1.2.1. Nilai Penting..... 12

1.2.2. Isu Strategis..... 13

1.3. Kondisi yang Diinginkan..... 13

2. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGELOLAAN..... 15

2.1. Visi..... 15

2.2. Misi..... 15

2.3. Tujuan Pengelolaan..... 15

3. STRATEGI DAN RENCANA AKSI..... 17

3.1. Strategi Pengelolaan..... 17

3.2. Rencana Aksi..... 20

3.3. Peran Para Pihak..... 20

4. STRATEGI DAN RENCANA AKSI..... 27

4.1. Pemantauan..... 27

4.2. Evaluasi..... 27

4.3. Pelaporan..... 28

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Luas Wilayah KPH Wilayah I Aceh Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutannya menurut Peta Kawasan Hutan dan Perairan	2
Tabel 2. Kondisi Kemiringan Lereng di KPH Wilayah I Aceh	4
Tabel 3. Jenis Formasi Geologi di KPH Wilayah I Aceh	6
Tabel 5. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan yang Tercatat di SMKG Cut Nyak Dhien, 2016.....	7
Tabel 4. Jenis Tanah di KPH Wilayah I Aceh.....	7
Tabel 6. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan yang Tercatat di SMKG Cut Nyak Dhien, 2016.....	8
Tabel 7. Status Konservasi Satwa Liar yang Ditemukan pada Lokasi Survei.....	9
Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Populasi menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya.....	10
Tabel 9. Konsep Matrik SWOT.....	18
Tabel 10. Analisis SWOT untuk Penyusunan Strategi Pengelolaan.....	19
Tabel 11. Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya.....	26
Tabel 12. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pengelolaan Habitat Gajah di Kabupaten Aceh Jaya.....	32

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya.....	1
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja KPH Wilayah I.....	3
Gambar 3. Kotoran dan Jejak Gajah.....	8
Gambar 4. Pohon ara (Ficus sp.) dan rumput bedé (Brachiaria decumbens).....	9
Gambar 5. Gajah Liar yang Ditemukan oleh Tim saat Melakukan Survei	12
Gambar 6. Diagram Analisis SWOT.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

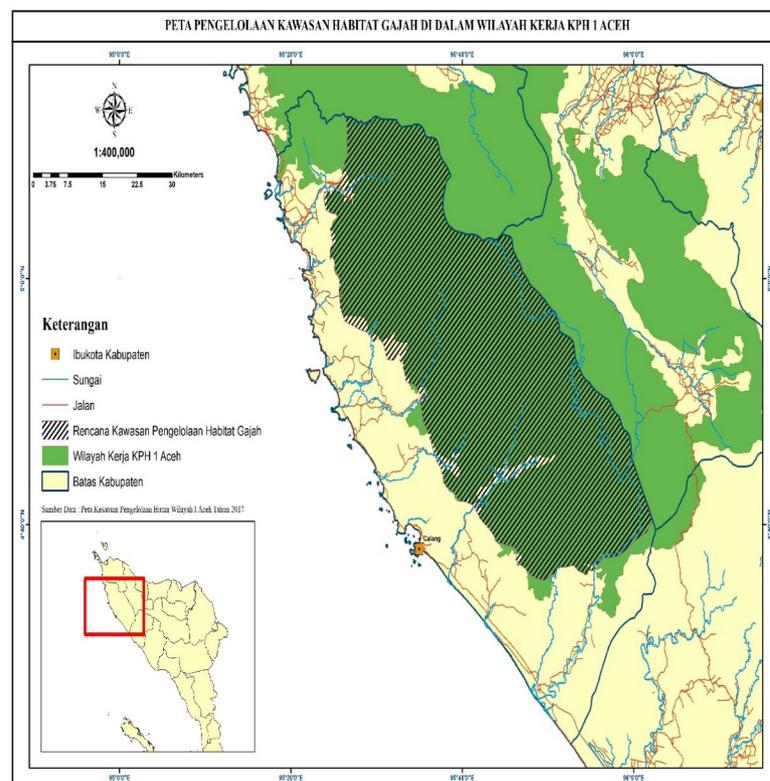
1.1.1. Letak, Luas dan Lokasi Kawasan

Kawasan perlindungan gajah di Aceh Jaya merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh. Secara geografis, kawasan perlindungan gajah berada di Kabupaten Aceh Jaya (Kecamatan Jaya, Sampoiniet, Setia Bakti, Indra Jaya, Darul Hikmah, Krueng Sabee, Panga, Teunom Pasie Raya). Secara astronomis, kawasan perlindungan gajah terletak pada koordinat N 04° 54' 10,59" E 095° 32' 33,52", dengan luas kawasan 235.416 hektar.

Batas terluar kawasan perlindungan gajah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar; Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Teunom;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sembilan Kecamatan di Aceh Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar;

Peta lokasi kawasan perlindungan gajah disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya

1.1.2. Risalah Kawasan

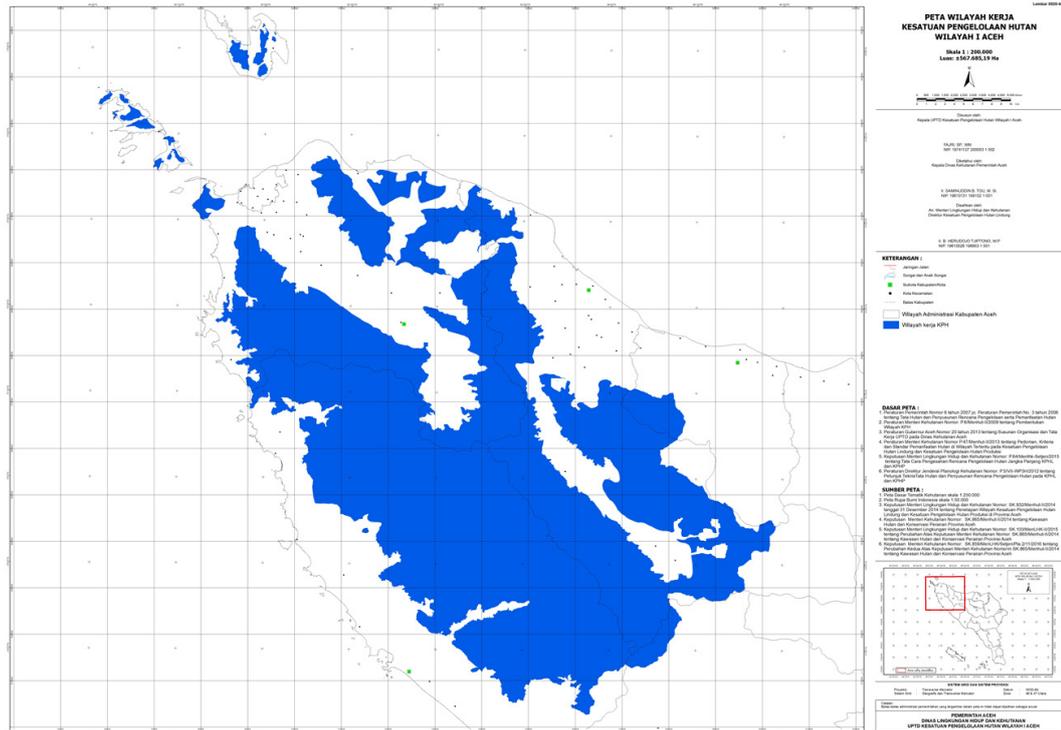
Kawasan pengelolaan gajah di Aceh Jaya merupakan kawasan dengan fungsi yaitu Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Areal Penggunaan Lain (APL), dengan luasan 234.1921,80 hektar. Wilayah tersebut merupakan salah satu bagian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan di tingkat tapak pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh. Sebagaimana yang tertuang pada Angka 19, Pasal 1, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan, menyebutkan bahwa wilayah kerja pada UPTD Hutan Aceh adalah wilayah yang mengelola hutan Aceh pada wilayah I sampai dengan wilayah VI berdasarkan perpaduan kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem wilayah, biofisik, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk selanjutnya disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selanjutnya Kesatuan Pengelolaan Hutan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Aceh, terdapat 6 unit KPHL yang membagi habis kawasan hutan di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah KPH Wilayah I Aceh yang wilayahnya meliputi kelompok daerah aliran sungai Krueng Aceh, Krueng Baroo, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setui, dan Alue Raya dengan luas wilayah ±571.921 ha (berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.932/Menhut-II/2014).

Luas wilayah KPH Wilayah I Aceh tersebut mengalami penyesuaian melalui Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Aceh dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 menjadi seluas 566.843,68 ha dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung (HL)	376.487,07	66.42
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	80.725,74	14.24
3	Hutan Produksi tetap (HP)	109.630,87	19.34
Jumlah		566.843,68	100.00

Tabel 1. Luas Wilayah KPH Wilayah I Aceh Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutannya menurut Peta Kawasan Hutan dan Perairan

Secara geografis, KPH Wilayah I Aceh terletak di antara 95° 0' 46,86" BT - 96° 19' 15,62" BT dan 4° 32' 27,69" LU - 5° 52' 55,98" LU. Peta wilayah kerja KPH Wilayah I Aceh dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja KPH Wilayah I

Secara ringkas, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum atas status kawasan hutan pada KPH I sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 12 Desember 1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas ± 3.475.010 hektar;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 42.616 (Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 130.542 (Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 26.461 (Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu) Hektar di Provinsi Aceh;
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dengan luas ± 255.585,39 hektar;
4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Aceh, terdapat 6 unit KPHL yang membagi habis kawasan hutan di Provinsi Aceh;
5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

6. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.

1.1.3. Aksesibilitas

Akses untuk menuju kawasan perlindungan habitat gajah adalah sebagai berikut:

- Dari ibukota Provinsi Aceh dapat ditempuh dengan perjalanan darat menuju Kabupaten Aceh Jaya, batas kawasan paling Utara dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan dengan kendaraan dan langsung sampai ke batas kawasan yang terletak di Kecamatan Jaya, sedangkan batas kawasan paling Selatan dapat ditempuh selama 4,5 jam dengan kendaraan dan dilanjutkan berjalan kaki sekitar 7 Km terletak di Kecamatan Pasie Raya;
- Untuk akses ke bagian pintu tengah kawasan yang terdekat dengan kawasan hutan lindung (HP) dibutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam perjalanan, dari Kota Banda Aceh (ibukota Provinsi Aceh) menuju Lhok Kruet yang terletak di Kecamatan Sampoiniet. Moda transportasi yang dapat digunakan seperti: kendaraan pribadi maupun kendaraan umum (Bus dan Minivan/L-300).
- Kemudian dari Simpang Lhok Kruet membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk mencapai camp CRU Sampoiniet sebagai unit pengelola ditingkat tapak. Kondisi jalan yang ditempuh untuk mencapai camp CRU Sampoiniet, sebagian merupakan jalan aspal (\pm 21 Km) dan sebagian lagi jalan tanah keras dan bebatuan (\pm 5 Km), kondisi jalan ini mudah dilalui dengan menggunakan mobil minibus biasa.

1.1.4. Kondisi Fisik

A. Topografi

Sebagian besar kondisi topografi di wilayah KPH Wilayah I Aceh didominasi oleh kelerengan yang landai dengan persentase 44.00% atau seluas 249.434,03 ha. Topografi datar terdapat di sekitar dusun-dusun, sungai, serta akses jalan dimana terdapat konsentrasi penduduk dan perladangan masyarakat. Sedangkan topografi datar ditemui dengan

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Keterangan	Luas (ha)	Persentase (%)
L1	0 – 8	Datar	83.652,36	14.76
L2	9 – 15	Landai	249.434,03	44.00
L3	16 – 25	Agak Curam	181.237,82	31.97
L4	26 – 40	Curam	51.779,45	9.13
-	(tidak ada data)	(tidak ada data)	740,02	0.14
Total			566.843,68	100.00

Sumber: Analisis spasial BPKH Wil. XVIII Banda Aceh, 2017

Tabel 2. Kondisi Kemiringan Lereng di KPH Wilayah I Aceh

persentase kurang dari 14.76%. Pada wilayah KPH Wilayah I Aceh ditemui daerah dengan kondisi kemiringan dengan kemiringan 26-40% dengan persentase kurang dari 10% luas wilayah. Kondisi kemiringan di wilayah KPH Wilayah I Aceh selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

B. Formasi Geologi

Kondisi geologis di areal KPH Wilayah I Aceh terbentuk dari berbagai jenis formasi batuan. Berdasarkan hasil analisa diperoleh hasil bahwa terdapat sekitar 61 jenis formasi batuan yang ada di wilayah tersebut, dengan persentase tertinggi adalah formasi Batolit Sikuleh (19.92%). Sisanya terbagi secara merata dengan persentase di bawah 10%. Jenis-jenis formasi batuan yang terdapat di wilayah KPH Wilayah I Aceh selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persentase
1	Batolit Sikuleh	12,887.44	19.91%
2	Batuan Gunungapi Temba	42,117.67	7.43%
3	Formasi Geumpang	38,159.79	6.73%
4	Formasi Meucampli	33,700.92	5.95%
5	Formasi Kueh	28,325.98	5.00%
6	Anggota Batugamping Terumbu	28,153.61	4.97%
7	Anggota Terumbu	25,267.58	4.46%
8	Formasi Lhoo	21,797.03	3.85%
9	Formasi Batugamping Raba	21,737.29	3.83%
10	Anggota Padang Tiji	21,463.31	3.79%
11	Formasi Tangla	21,277.54	3.75%
12	Kelompok Woyla Tak terpisahkan	20,314.29	3.58%
13	Fasies Gunungapi	14,634.42	2.58%
14	Aluvium Muda	13,964.49	2.46%
15	Formasi Kotabakti	9,782.49	1.73%
16	Komplek Gle Seukeun	9,769.25	1.72%
17	Formasi Jeleum	9,445.53	1.67%
18	Formasi BatugampingTeunom	9,428.71	1.66%
19	Anggota Ligan	9,421.19	1.66%
20	Formasi Agam	7,215.63	1.27%
21	Komplek Indrapuri	6,421.57	1.13%
22	Batuan Gunungapi Peuet Sague, Samalanga	5,503.07	0.97%
23	Formasi Gunungapi Calang	5,410.47	0.95%
24	Lamno Limestone Formation	4,877.68	0.86%
25	Anggota Batugamping Geupang	4,446.59	0.78%
26	Anggota Meuh Member	4,421.84	0.78%
27	Batuan Gunungapi Bentaro	4,404.85	0.78%
28	Satuan Leuping	3,345.62	0.59%
29	Batuan Gunungapi Pulau Weh	3,141.32	0.55%

No	Jenis Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persentase
30	Aneka Terobosan	2,828.65	0.50%
31	Anggota Meujeumpo	2,545.69	0.45%
32	Serpentin Tangse	2,224.91	0.39%
33	Batuan Gunungapi Volcanic	2,137.93	0.38%
34	Anggota Lahar	2,083.76	0.37%
35	Anggota Pintu Satu	1,716.74	0.30%
36	Anggota Keubang	1,684.67	0.30%
37	Formasi Lam Minet	1,224.88	0.22%
38	Formasi Peunasu	1,123.70	0.20%
39	Anggota Batugamping Bengga	1,095.35	0.19%
40	Diorit Unga	901.08	0.16%
41	Formasi Seulimeun	773.82	0.14%
42	Serpentinit	705.23	0.12%
43	Anggota Batugamping Lam Kubue	642.40	0.11%
44	Anggota Batugamping	571.48	0.10%
45	Anggota Senong	570.59	0.10%
46	Satuan Meukeub	466.74	0.08%
47	Formasi Idi	394.79	0.07%
48	Formasi Simellit	392.65	0.07%
49	Batolit Sikuleh (komplek tua)	367.21	0.06%
50	Mikrodiorit Inong	346.26	0.06%
51	Batuan Gunungapi Olim	299.98	0.05%
52	Takengon-Calang (Cek)	233.68	0.04%
53	Formasi Lho'nga	210.53	0.04%
54	Mikrogabro Rob	160.47	0.03%
55	Formasi Gume	50.25	0.01%
56	Formasi Siap	36.32	0.01%
57	Granodiorit Geunteut	21.37	0.00%
58	Intrusi Beurieung	4.68	0.00%
59	Diorite Raya	0.95	0.00%
60	Formasi Sipopok	0.70	0.00%
61	Batuan Gunungapi Peuet Sague Meuntoi	0.04	0.00%
	(tidak ada data)	209.02	0.04%
Jumlah		566,843.68	100.00%

Sumber: Analisis spasial BPKH Wil. XVIII Banda Aceh, 2017

C. Jenis Tanah

Berdasarkan hasil analisa data, jenis tanah Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol, dan Litosol merupakan jenis tanah yang paling dominan di areal KPH Wilayah I Aceh, yaitu seluas 219.525,46 (38.73%). Jenis tanah

yang terdapat di wilayah KPH Wilayah I Aceh selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol	219,525.46	38.73%
2	Komplek Rensing dan Litosol	119,821.61	21.14%
3	Latosol	58,206.45	10.27%
4	Podsolik Merah Kuning	56,369.79	9.94%
5	Komplek Podsolik Merah Kuning dan Litosol	40,377.76	7.12%
6	Aluvial	20,929.80	3.69%
7	Andosol	20,569.86	3.63%
8	Komplek Podsolik Coklat, Podsol dan Litosol	20,070.24	3.54%
9	Organosol dan Gle Humus	5,227.28	0.92%
10	Regosol	2,740.03	0.48%
11	Renzina	1,144.15	0.20%
	(tidak ada data)	1,881.26	0.33%
Jumlah		566,843.68	100.00%

Sumber: Analisis spasial BPKH Wil. XVIII Banda Aceh, 2017

Tabel 4. Jenis Tanah di KPH Wilayah I Aceh

D. Iklim

Secara umum iklim di Kabupaten Aceh Jaya termasuk dalam daerah tropis dengan tipe iklim muson. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson wilayah ini termasuk dalam tipe C. Suhu rata-rata 26.8°C dengan suhu tertinggi sebesar 32,5°C terjadi pada bulan Maret dan April, serta suhu terendah sebesar 22.2°C terjadi pada bulan Juni dengan kelembaban udara rata-rata 88%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	32,0	24,1	27,5	91	74	90
Februari	32,2	23,7	27,1	97	84	91
Maret	32,5	23,0	28,0	95	85	88
April	32,5	24,0	27,8	94	86	89
Mei	31,8	24,1	27,2	95	85	89
Juni	31,8	22,2	26,9	97	80	85
Juli	31,7	22,8	26,5	91	79	85
Agustus	31,6	23,0	26,3	96	78	86
September	31,5	22,8	26,4	91	81	85
Oktober	30,6	22,4	26,0	98	81	89

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
November	30,6	22,6	26,1	95	87	91
Desember	30,6	22,3	26,0	97	87	92

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien Tahun 2016

Tabel 5. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan yang Tercatat di SMKG Cut Nyak Dhien, 2016

Untuk data curah hujan di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
1	Januari	495	15
2	Februari	261	10
3	Maret	271	12
4	April	354	16
5	Mei	653	21
6	Juni	303	16
7	Juli	105	7
8	Agustus	566	14
9	September	170	17
10	Oktober	477	19
11	November	523	23
12	Desember	262	16

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien Tahun 2016

Tabel 6. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan yang Tercatat di SMKG Cut Nyak Dhien, 2016

1.1.5. Potensi Kawasan

Hutan di Aceh Jaya dan sekitarnya merupakan kawasan Hutan Hujan Tropis. Ciri khas Hutan Hujan Tropis adalah adanya hujan dan panas sepanjang tahun secara bergantian yang durasinya didasarkan dan tergantung pada musim. Curah hujan dan panas yang cukup telah menyebabkan tumbuh-tumbuhan di kawasan ini dapat hidup subur dengan kekayaan jenis yang sangat tinggi.

Berdasarkan survei yang dilakukan, hutan Aceh Jaya menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari vegetasi hutan yang masih baik dan banyaknya terdapat jenis tumbuhan serta juga ditemukan berbagai jenis satwa seperti gajah, harimau, kijang, kancil, rangkong, beruang madu dan satwa lainnya antara lain ditemukan secara langsung individu, jalur jelajah, kotoran, jejak, kaisan/cakaran, dan lain-lain.

Sebagai sebuah ekosistem, kondisi hutan Aceh Jaya masih potensial untuk mendukung keberlangsungan hidup gajah Sumatera. Pada hutan sekunder yang ada banyak terdapat sumber pakan alami gajah, hutan



Gambar 3. Kotoran dan Jejak Gajah

primernya yang luas memiliki tutupan tajuk yang baik. Dari pengamatan survei terlihat jalur jelajah gajah terdapat di dua tipe hutan, yaitu hutan sekunder dan primer, namun jejak gajah cenderung lebih banyak ditemukan pada tipe hutan sekunder, karena banyak terdapat sumber pakan dan memiliki topografi landai. Hutan sekunder yang ada merupakan lahan hutan yang sedang mengalami suksesi, karena sebelumnya sebagian lahan ini merupakan kawasan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari PT. Aceh Inti Timber yang terakhir beroperasi pada kisaran tahun 1990-an (berhenti beroperasi karena adanya moratorium logging di Aceh). Kedua tipe hutan yang digunakan gajah ini berada pada ketinggian 40 mdpl hingga 450 mdpl dengan kemiringan lahan antara 0–20%, karakter lahan seperti ini ideal sebagai habitat gajah, walaupun sebenarnya gajah juga dapat berada sampai pada ketinggian diatas 1.000 mdpl. Dari laporan pendakian tim Mapala STIK Banda Aceh tahun 2006 ke puncak gunung Ulumasen, di jalur pendakian banyak ditemukan jejak gajah hingga sampai di ketinggian 2.300 mdpl.

Sebagai data pendukung tim juga mencatat beberapa jenis tumbuhan yang disukai gajah antara lain;

- a. Jenis Rumput: *Pennisetum purpureum*, *Angiopteris avecta*, *Nephrolepis exaltata*, *Axonopus compressus*, *Cynodon dactylon*, *Desmodium dichotomum*, *Gleichenia linearis*, *Ichnanthus vicinus*, *Imperata cylindrica*, *Mimosa pudica* dan lain-lain,
- b. Jenis Pohon: *Mallotus paniculatus*, *Macaranga pruinosa*, *Macaranga gigantea*, *Macaranga tanarius*, *Ficus sp.*, *Pueraria phaseoloides*, *Albizzia falcata*, *Parkia speciosa*, dan lain-lain.



Gambar 4. Pohon ara (*Ficus sp.*) dan rumput bede (*Brachiaria decumbens*)

No.	Jenis	Nama Latin	Status
1.	Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus sumatranus</i>	CR
2.	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris</i>	CR
3.	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	LC
4.	Kancil	<i>Tragulus kanchil</i>	LC
5.	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>	VU
6.	Rangkong	<i>Buceros sp.</i>	NT

Keterangan: status berdasarkan IUCN (2017), CR = *Critically Endangered*, kritis; VU = *Vulnerable*, rentan; LC = *least concern*, tidak terancam; NT = *near threatened*, mulai terancam.

Tabel 7. Status Konservasi Satwa Liar yang Ditemukan pada Lokasi Survei

1.1.6. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kondisi sosial masyarakat di areal kerja KPH Wilayah I Aceh memiliki keterkaitan langsung dengan eksistensi dan potensi sumberdaya hutan. Kebijakan pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang sudah berlangsung di masyarakat sekitar hutan dan tetap mengkomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Struktur mata pencaharian masyarakat sekitar hutan meliputi sektor pertanian dalam arti luas, industri, pariwisata, dan lain-lain;
- Sumber-sumber pendapatan masyarakat, terutama yang berasal dari sumberdaya hutan sebagai realitas pengelolaan hutan yang sudah berlangsung;
- Pengaruh dan dampak yang terjadi dalam pengelolaan hutan terhadap perubahan struktur mata pencaharian serta tingkat pendapatan masyarakat.

Lokus dari kawasan perlindungan gajah yaitu di Kabupaten Aceh Jaya yang mencakup sembilan kecamatan, yaitu: Teunom, Pasie Raya, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, Darul Hikmah, Jaya, dan Indrajaya. Jumlah penduduk dan populasi menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Kecamatan	Luas Km2	Populasi			Jumlah KK
		L a k i - laki	Perempuan	Jumlah Total	
Teunom	141,00	6.543	6.385	12.928	4.254
Pasie Raya	426,00	3.292	3.314	6.606	4.888
Panga	405,00	3.748	3.712	7.460	2.584
Krueng Sabee	588,00	8.522	7.415	15.937	2.141
Setia Bakti	629,00	4.467	4.102	8.569	4.383
Sampoiniet	426,00	3.781	3.326	7.107	2.509
Total	3.814,00	45.476	42.146	87.622	26.922

Kecamatan	Luas Km2	Populasi			Jumlah KK
		L a k i - laki	Perempuan	Jumlah Total	
Darul Hikmah	575,00	3.422	3.115	6.537	2.163
Jaya	324,00	8.196	7.728	15.924	1.911
Indrajaya	300,00	3.505	3.049	6.554	2.089
Total	3.814,00	45.476	42.146	87.622	26.922

Sumber: Kabupaten Aceh Jaya Dalam Angka, 2017

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Populasi menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dengan proporsi terbesar yaitu 15.937 jiwa (18,19 %) dan proporsi terendah di Kecamatan Darul Hikmah yaitu 6.537 jiwa (7,46 %). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 51,90 % laki-laki dan 48,10 % perempuan. Sehingga secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Hubungan antar masyarakat desa yang satu dengan masyarakat desa lainnya mempunyai ikatan pertalian keluarga atau kekerabatan yang masih terus dipertahankan sampai saat sekarang baik dalam membangun komunikasi antar keluarga maupun berinteraksi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya setempat yang merupakan kekuatan lokal untuk terus dijaga dan diberi apresiasi sehingga selanjutnya dapat dikembangkan menjadi aset daerah yang mempunyai nilai spesifik dan dapat diinteraksikan ke dalam Pranata Normatif untuk dikaitkan dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh.

Berdasarkan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Angka 2017, mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya yaitu; pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, pertambangan, penggalian, dan lain-lain. Mayoritas penduduk pada umumnya berprofesi sebagai petani.

Pada umumnya penduduk di Kabupaten Aceh Jaya mayoritas beragama Islam dengan sarana ibadah berupa masjid dan mushola. Pada tahun 2016, di Kabupaten Aceh Jaya tercatat 118 masjid dan 195 meunasah/dayah sulok yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Penduduk dalam menjalankan ibadahnya menjunjung tinggi nilai-nilai dalam beragama sehingga merupakan salah satu modal dasar yang cukup signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kelembagaan yang bersifat permanen seperti misalnya lembaga adat seperti Mukim dan Tuha Lapan serta kelembagaan pemerintahan seperti desa/gampong (Kantor Kepala Desa/Keuchik) mempunyai struktur sama dengan desa lainnya di Indonesia, ada Kepala Desa/keuchik, Sekretaris Desa dan beberapa Kepala Urusan yang bersifat operasional, selain itu di tingkat desa/gampong seperti Tuha Pet, Badan Kesejahteraan Masyarakat, Ketua Pemuda/Karang Taruna, PKK, Majelis Taklim dll. Secara struktural dibawah Desa/Gampong ada Dusun, lembaga-lembaga ini merupakan unsur penting dalam proses pembangunan.

Infrastruktur perekonomian pada empat wilayah kabupaten tersebut cukup memadai dengan adanya lembaga-lembaga ekonomi berupa Bank, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya yang mendukung proses ekonomi wilayah. Termasuk sarana prasarana dan sistem transportasi darat, laut dan udara.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam upaya pengembangan kawasan adalah aspek budaya, aspek ini mempunyai nilai-nilai yang masih sangat dipertahankan sebagai landasan hidup dalam bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat luar dan pranata global.

1.2. Kondisi Saat Ini

1.2.1. Nilai Penting

Sebagaimana hasil dari survei lapangan dan kondisi saat ini, sebagian wilayah KPH I, tepatnya di Kabupaten Aceh Jaya merupakan habitat bagi satwa liar yang dilindungi serta penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, regional dan global yaitu Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Diperkirakan jumlah gajah liar yang ada di Kabupaten Aceh Jaya adalah 68 – 72 individu. Gajah tersebut terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu kelompok Krueng Sabee (15 – 20 individu), kelompok Pante Kuyun (10 – 15 individu), kelompok Masen (8 – 10 individu), kelompok Krueng Ligan (18 – 22 individu), dan kelompok Babah Awe (3 – 5 individu). Diketahui juga dari hasil survei bahwa terdapat lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya gajah (ruang yang paling banyak digunakan gajah) yaitu di Babah Ro, Masen dan DAS Krueng Sabee. Ketiga lokasi ini dijadikan sebagai tempat bersosialisasi bagi gajah.



Gambar 5. Gajah Liar yang Ditemukan oleh Tim saat Melakukan Survei

Hutan Aceh Jaya juga menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari vegetasi hutan yang masih baik

dan banyaknya terdapat jenis tumbuhan serta juga ditemukan berbagai jenis satwa seperti harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), kijang (*Muntiacus muntjak*), kancil (*Tragulidus kanchil*), rangkong (*Buceros sp.*), beruang madu (*Helarctos malayanus*) dan satwa lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, nilai penting kawasan hutan Aceh Jaya adalah untuk:

- a. Perlindungan satwa langka yang dilindungi, seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, kijang, kancil, rangkong, beruang madu dan satwa liar lainnya; dan
- b. Pelestarian plasma nutfah untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan cinta alam dan wisata alam.

1.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, diskusi dengan para pihak dan berbagai laporan hasil survei terdapat beberapa isu strategis dalam pengelolaan kawasan gajah di Aceh Jaya, yaitu:

1. Belum optimalnya peran Conservation Response Unit (CRU) Sampoinet sebagai unit pengelolaan tingkat tapak;
2. Masih terjadinya konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, berdasarkan data kejadian konflik gajah dan manusia di Kabupaten Aceh Jaya, tercatat 90 (Sembilan puluh) kali konflik terjadi, atau rata-rata terjadi 9 (sembilan) kali konflik dalam setiap tahunnya;
3. Pengelolaan habitat gajah belum terpadu;
4. Dibutuhkan sinergitas multipihak dalam mengelola kawasan yang menjadi habitat gajah di Kabupaten Aceh Jaya.

1.3. Kondisi yang Diinginkan

Melalui pengelolaan habitat gajah yang terencana dan terintegrasi, diharapkan kondisi berikut dapat dicapai, yaitu:

1. Gajah liar yang berkonflik dapat kembali ke habitat alaminya;
2. Adanya respon cepat terhadap konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya;
3. Intensitas konflik antara manusia dan gajah liar yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dapat menurun;
4. CRU Sampoinet dapat mandiri dalam segi kelembagaan dan bekerja secara optimal dalam penanganan konflik antara manusia dan gajah liar;
5. Meningkatnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya.



BAB II.

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGELOLAAN

2.1. Visi

Memperhatikan kondisi saat ini sekaligus keterkaitan kehidupan masyarakat sekitar kawasan perlindungan gajah serta pengembangan wilayah, sehingga visi pengelolaan kawasan adalah:

“Terwujudnya Kolaborasi Pengelolaan Habitat Gajah untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat”

2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pengelolaan yang telah disusun, maka misi pengelolaan kawasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kolaborasi pengelolaan habitat gajah;
2. Beroperasinya CRU Sampoiniet secara mandiri, baik dari segi kelembagaan maupun penanganan konflik;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti penting keberadaan gajah;
4. Meminimalisir tingkat konflik antara manusia dan gajah liar yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya.

2.3. Tujuan Pengelolaan

Berdasarkan visi dan misi pengelolaan, maka tujuan pengelolaan kawasan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam rangka pengelolaan habitat gajah;
2. Meningkatkan sumberdaya CRU Sampoiniet dalam rangka terwujudnya CRU yang mandiri dan optimal dalam rangka penanganan konflik;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi gajah dan habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya;
4. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya.



BAB III.

STRATEGI DAN RENCANA AKSI

3.1. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis ini mempertimbangkan kekuatan (strengths), peluang (opportunities), kelemahan (weaknesses), dan ancaman (threats).

Untuk penilaian dalam analisis SWOT ini diperlukan data/informasi yang dikelompokkan berdasarkan faktor lingkungan internal (kekuatan, kelemahan), dan faktor lingkungan eksternal (peluang, ancaman) yang ada. Dalam analisis SWOT dijelaskan faktor-faktor lingkungan yang dikelompokkan berdasarkan kuadran (Gambar 6) dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Kuadran 1**

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Pengelola tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).

- **Kuadran 2**

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, pengelola ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi pengelolaan (produk/pasar).

- **Kuadran 3**

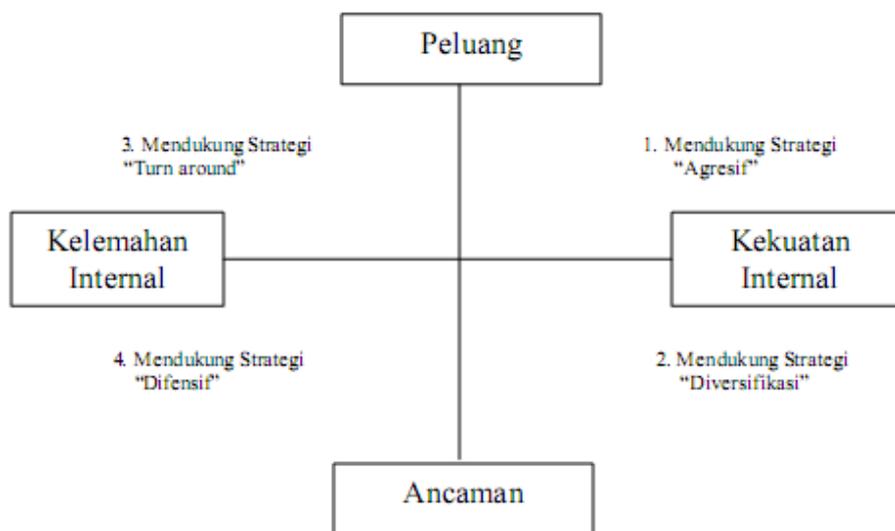
Pengelola menghadapi peluang pasar yang sangat besar, akan tetapi dilain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Strategi yang harus diterapkan adalah meminimalkan masalah pengelolaan internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

- **Kuadran 4**

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, pengelola tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Analisa SWOT dapat menghasilkan 4 (empat) kemungkinan strategi pengembangan, yaitu:

- Strategi Strength-Opportunities (SO), strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran pengelola, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;
- Strategi Weakness-Opportunities (WO), strategi ini diterapkan



Gambar 6. Diagram Analisis SWOT

berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada;

- Strategi Strength-Threat (ST), ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki pengelola untuk mengatasi ancaman;
- Strategi Weakness-Threat (WT), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan pengelola meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Internal / External	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunities)	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats)	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Tabel 9. Konsep Matrik SWOT

Analisis SWOT dilakukan pada faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal, yang secara langsung dapat mempengaruhi kegiatan pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya. Hasil dari rumusan analisis SWOT di atas, maka strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan pengelolaan kawasan perlindungan gajah disajikan pada Tabel 10.

<p style="text-align: center;">LINGKUNGAN INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat populasi gajah liar di Kabupaten Aceh Jaya 2. Ketersediaan habitat dan pakan gajah 3. Terdapat CRU pada tingkat tapak dalam penanganan konflik antara manusia dan gajah liar 4. Memiliki potensi ekowisata 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah konflik tersebar hampir di seluruh Kabupaten Aceh Jaya 2. Tumpang tindih antara home range gajah dengan lahan perkebunan masyarakat 3. Kurangnya sumber daya dalam penanganan konflik 4. Belum optimalnya sinergitas para pihak dalam pengelolaan kawasan yang menjadi habitat gajah di Kabupaten Aceh Jaya 5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang konservasi gajah liar.
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang pengembangan ekowisata 2. Gajah termasuk salah satu satwa kunci yang dilindungi baik nasional maupun internasional 3. Dukungan para pihak dalam mewujudkan pengelolaan tingkat tapak (CRU) 4. Dukungan pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terhadap pengelolaan kawasan perlindungan gajah. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kegiatan ekonomi kreatif melalui aktivitas ekowisata 2. Penguatan kelembagaan CRU sebagai unit tingkat tapak dalam penanganan konflik 3. Pengembangan kerjasama para pihak dalam pengelolaan kawasan perlindungan gajah. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan CRU baik secara kapasitas maupun kualitas 2. Penguatan sarana dan prasarana dalam penanganan konflik 3. Peningkatan penyadartahuan tentang konservasi gajah kepada masyarakat 4. Peningkatan koordinasi para pihak dalam pengelolaan habitat gajah di Kabupaten Aceh Jaya.
<p style="text-align: center;">THREATS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada beberapa daerah terdapat konflik antara manusia dengan gajah liar 2. Wilayah konflik tersebar hampir di Masih ditemukannya kegiatan ilegal kehutanan di dalam kawasan seperti perambahan dan penebangan (illegal logging), dan perburuan liar 3. Kebutuhan lahan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk (habitat gajah semakin mengecil). 	<p style="text-align: center;">STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi lintas sektor. 2. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan. 3. Pengelolaan kawasan berdasarkan fungsi kawasan 4. Penanggulangan konflik antara manusia dan gajah liar. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan 2. Peningkatan penyadartahuan tentang konservasi gajah kepada masyarakat 3. Pembangunan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan kawasan.

Tabel 10. Analisis SWOT untuk Penyusunan Strategi Pengelolaan

3.2. Rencana Aksi

Strategi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya pada dasarnya mengacu pada 3 (tiga) pilar pembentuk konservasi yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan, maka dapat dirumuskan rencana aksi atau kegiatan pengelolaan kawasan perlindungan gajah yang akan dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Membangun kolaborasi pengelolaan kawasan.
2. Melakukan koordinasi para pihak dalam rangka pengelolaan kawasan.
3. Menciptakan jejaring kerja dengan masyarakat, organisasi non pemerintah dan pihak terkait lainnya (lokal, nasional dan internasional).
4. Melakukan evaluasi beban kerja dan analisis kebutuhan personil dalam penanganan konflik.
5. Pelatihan dan pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM CRU.
6. Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana CRU dalam penanganan konflik.
7. Peningkatan kapasitas pemandu ekowisata.
8. Pengadaan ekonomi kreatif berbasis ekowisata (souvenir, pengadaan pakan gajah, dan lain-lain).
9. Sosialisasi kepada masyarakat.
10. Memberikan pelatihan dalam rangka penanganan konflik kepada masyarakat.
11. Assesment habitat gajah.
12. Pembangunan barrier gajah.
13. Melakukan patroli kawasan: reguler dan tidak reguler.
14. Memperkuat pembinaan ranger.

3.3. Peran Para Pihak

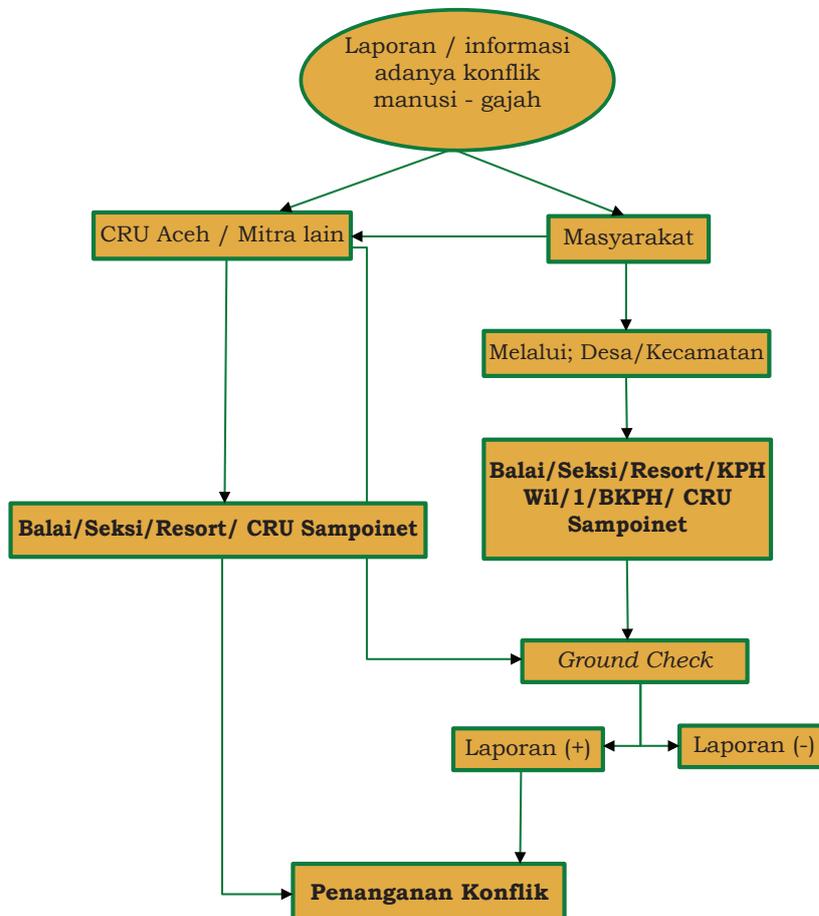
Kolaborasi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama antara organisasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah (KPH Wilayah I, BKSDA Aceh dan CRU Aceh). KPH Wilayah I merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya, salah satunya Kabupaten Aceh Jaya, BKSDA Aceh merupakan pihak yang memiliki tugas dalam pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya (khususnya gajah Sumatera) di wilayah kerjanya, sedangkan CRU Aceh merupakan organisasi yang mendukung dan berperan dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Aceh. Kolaborasi ini terjadi karena adanya ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sulit dicapai secara mandiri.

Peran masing-masing para pihak dalam kolaborasi pengelolaan

kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

1. Peran KPH Wilayah I
 - a. Sebagai pemangku wilayah kerja pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait rencana pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Peran BKSDA Aceh
 - a. Melakukan mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan pengelolaan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Memperkuat kelembagaan dan peranan CRU Sampoinet sebagai unit tingkat tapak dalam penanganan konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Aceh Jaya;
3. Peran CRU Aceh
 - a. Memfasilitasi dalam perencanaan dan aksi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Mengawal rencana pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM personil CRU Sampoinet sebagai pengelola ditingkat tapak dan masyarakat di lokasi rawan konflik.

Alur komunikasi Laporan konflik



Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Lokasi	Sumber Pendanaan
<p>Visi: Terwujudnya Kolaborasi Pengelolaan Habitat Gajah Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kolaborasi pengelolaan habitat gajah 2. Beroperasinya CRU Sampoinet secara mandiri, baik dalam segi kelembagaan maupun dalam penanganan konflik 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti penting keberadaan gajah 4. Meminimalisir tingkat konflik antara manusia dan gajah liar yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya 	<p>1. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam rangka pengelolaan habitat gajah</p>	<p>1.1. Pembangunan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan lolaan kawasan</p>	<p>a. Membangun kolaborasi pengelolaan kawasan</p>	<p>Terbangunnya kolaborasi dengan para pihak melalui kerjasama dalam pengelolaan lolaan kawasan</p>	<p>KPH I, BKSDA Aceh, CRU Aceh</p>	<p>Banda Aceh dan Aceh Jaya</p>	<p>APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat</p>

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Lokasi	Sumber Pendanaan
			b. Melakukan koordinasi para pihak dalam rangka pengelolaan kawasan	Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara para pihak dalam rangka pengelolan kawasan	KPH I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, dan pihak terkait lainnya	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
		1.2. Penguatan kerjasama para pihak dalam pengelolaan kawasan perlindungan gajah	Menciptakan jejaring kerja dengan masyarakat, organisasi non pemerintah dan pihak terkait lainnya (lokal, nasional dan internasional)	Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan masyarakat, organisasi non pemerintah dan pihak terkait lainnya (lokal, nasional dan internasional)	KPH I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, masyarakat, dan pihak terkait lainnya	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
	2. Meningkatkan sumberdaya CRU Sampoinet dalam rangka terwujudnya CRU yang mandiri dan optimal dalam penanganan konflik	2.1 Penguatan kelembagaan CRU sebagai unit tingkat tapak dalam penanganan konflik	a. Melakukan evaluasi beban kerja dan analisis kebutuhan personil dalam penanganan konflik	Adanya gambaran tentang kebutuhan personil dalam penanganan konflik	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Lokasi	Sumber Pendanaan
			b. Pelatihan dan pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM CRU	Meningkatnya kapasitas SDM CRU	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
		2.2 Penguatan sarana dan prasarana dalam penanganan konflik	Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana CRU dalam penanganan konflik	Terbangun dan lengkapnya sarana dan prasarana CRU yang dibutuhkan dalam penanganan konflik	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
		2.3 Pengembangan kegiatan ekonomi kreatif melalui aktivitas ekowisata	a. Peningkatan kapasitas pemandu ekowisata b. Pengadaan ekonomi kreatif berbasis ekowisata (souvenir, pengadaan pakan gajah, dan lain-lain)	Terbentuknya kelompok pemandu yang handal Munculnya produk souvenir dan pakan gajah	KPH I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, Dinas Pariwisata Aceh Jaya, masyarakat, dan pihak terkait lainnya KPH I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, Dinas Pariwisata Aceh Jaya, masyarakat, dan pihak terkait lainnya	Banda Aceh dan Aceh Jaya Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Lokasi	Sumber Pendanaan
	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi gajah dan habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya	3.1 Peningkatan penyadaran huan tentang konservasi gajah kepada masyarakat	a. Sosialisasi kepada masyarakat	Meningkatnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang konservasi gajah	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
			b. Memberikan pelatihan dalam rangka penanganan konflik kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dalam rangka konflik kepada masyarakat	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
	4. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya	4.1 Penanggulangan konflik antara manusia dan gajah liar	a. <i>Assesment</i> habitat gajah	Terdatanya kondisi habitat gajah	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Lokasi	Sumber Pendanaan
			b. Pembangunan barrier gajah	Terbangunnya barrier gajah	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
		4.2 Penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan	a. Melakukan patroli kawasan; regulasi dan tidak reguler b. Memperkuat pembinaan ranger	Berkurangnya kegiatan Tipihut di kawasan Meningkatnya kapasitas ranger	KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
					KPH I, BKS-DA Aceh, dan CRU Aceh	Banda Aceh dan Aceh Jaya	APBA, APBN, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat

Tabel 11. Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya

BAB III.

STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu upaya optimalisasi pengelolaan sehingga mengacu pada kaidah-kaidah konservasi dengan cara penerapan evaluasi aspek-aspek teknis yang akurat dan tepat. Disamping itu, untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya diperlukan upaya pemantauan dan evaluasi agar penyelenggaraan pengelolaan kawasan tersebut dapat terukur dan akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari kegiatan itu sendiri. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dilakukan di kawasan dapat diketahui. Hasil dari pemantauan dan evaluasi merupakan informasi berharga yang dijadikan pedoman bagi pihak pengelola untuk mengambil keputusan pengembangan pengelolaan kawasan yang lebih baik.

4.1. Pemantauan

Pemantauan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan untuk mengadakan perbaikan.

Mekanisme pemantauan dilakukan terhadap kawasan secara rutin terutama terkait dengan berbagai hal yang potensial mengganggu kawasan. Pemantauan terhadap aktivitas eksternal berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan seperti perambahan hutan, perburuan liar dan penebangan liar. Kegiatan pemantauan ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam sebuah pengelolaan kawasan, peranan masyarakat dalam berpartisipasi memantau kegiatan yang berpotensi merusak kawasan sangat berarti dan tidak bisa diabaikan. Dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan pemantauan maka secara tidak langsung akan membangun tingkat kesadaran masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem secara berkelanjutan.

4.2. Evaluasi

Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan,

dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi.

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
- Menunjukkan di mana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan
- Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan
- Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pengelolaan.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan/ pencapaian Tujuan Pengelolaan. Evaluasi dilakukan paling lama 5 tahun sekali. Berkenaan dengan hal tersebut, Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan utama yang menjadi alat pencapaian tujuan pengelolaan.

4.3. Pelaporan

Laporan yang disusun memuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Disamping itu, laporan berisi temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan. Substansi rekomendasi difokuskan pada upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang ditemukan dalam pemantauan dan evaluasi. Formulasi rekomendasi disusun dalam bentuk tindak lanjut.

No.	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Pemantauan			Evaluasi		
			Waktu	Pihak yang terlibat	Metode	Waktu	Pihak yang terlibat	Metode
1	Meningkatkan sinergitas para pihak dalam rangka pengelolaan habitat gajah	<p><i>Baseline:</i> Belum pernah ada lokasi yang menjadi fokus dalam pengelolaan kawasan perlindungan gajah</p> <p><i>Target:</i> Terbangunnya kolaborasi pengelolaan para pihak dalam rangka perlindungan habitat gajah di Kabupaten Aceh Jaya</p> <p>Asumsi: gajah merupakan satwa liar yang dilindungi dan menjadi tugas BKSDA Aceh untuk melakukan upaya konservasi gajah, namun saat ini habitatnya berada di wilayah pengelolaan KPH Wilayah I. Sehingga pengelolaan kawasan perlindungan gajah membutuhkan peran para pihak</p>	Setiap tahun sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kegiatan	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, dan CRU Aceh	Analisis hasil-hasil laporan perkembangan kegiatan	Maksimal 5 tahun sekali	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, Masyarakat	Analisis hasil-hasil laporan perkembangan

No.	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Pemantauan			Evaluasi		
			Waktu	Pihak yang terlibat	Metode	Waktu	Pihak yang terlibat	Metode
2	Meningkatkan sumberdaya CRU Sam-poinet dalam rangka terwujudnya CRU yang mandiri dan optimal dalam rangka penanganan konflik	<p><i>Baseline:</i> Belum ada data standar kebutuhan dalam sebuah CRU (baik jumlah, kapasitas, maupun anggaran)</p> <p><i>Target:</i> CRU dapat bekerja secara optimal dengan didukung personil dengan kapasi- tas yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran yang tersedia</p> <p>Asumsi: Kebutuhan pendanaan, sarana pra sarana, dan pendukung pengelolaan terpenuhi dari berbagai sumber pendanaan baik internal maupun eksternal</p>	Setiap tahun sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kegiatan	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, dan mitra lainnya	Pertemuan internal dan analisa terhadap target yang ingin dicapai	Maksimal 5 tahun sekali	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, CRU Aceh, mitra lainnya, dan masyarakat	Penilaian terhadap kondisi yang ada

No.	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Pemantauan			Evaluasi		
			Waktu	Pihak yang terlibat	Metode	Waktu	Pihak yang terlibat	Metode
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi gajah dan habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya	<p>Baseline: konflik yang terus terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan sebagian masyarakat menganggap bahwa gajah sebagai hama</p> <p>Target: masyarakat dapat hidup berdampingan dengan gajah dan menumbuhkan sikap konservasi terhadap keberadaan gajah di Kabupaten Aceh Jaya</p> <p>Asumsi: riset telah dilakukan dengan memanfaatkan data yang tersedia dan peran para mitra dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat</p>	Setiap tahun sebagai bagian dari proses penyusunan kegiatan	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, dan CRU Aceh	Analisis hasil dari kegiatan yang dilakukan dan questioner untuk mengetahui sikap masyarakat	Maksimal 5 tahun sekali	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, dan CRU Aceh	Analisis hasil kegiatan dan hasil pembagian kuisioner

No.	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Pemantauan			Evaluasi		
			Waktu	Pihak yang terlibat	Metode	Waktu	Pihak yang terlibat	Metode
4	Meningkatkan perlindungan dan penanganan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya	<p><i>Baseline:</i> jumlah populasi gajah di Kabupaten Aceh Jaya saat ini adalah 68 – 72 individu dengan habitat dan sumber pakan yang mencukupi</p> <p><i>Target:</i> meminimalisir tingkat konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya</p> <p>Asumsi: dengan hadirnya CRU Sampoinet dapat meminimalisir tingkat konflik dan peran para mitra dalam mendukung penanganan konflik (patroli, pembangunan barrier, dan lain-lain)</p>	Setiap tahun sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kegiatan	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, dan CRU Aceh	Analisis hasil kegiatan yang dilakukan	Maksimal 5 tahun sekali	KPH Wilayah I, BKSDA Aceh, dan CRU Aceh	Analisis terhadap keseluruhan kegiatan dengan baseline data yang telah ada

Tabel 12. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pengelolaan Habitat Gajah di Kabupaten Aceh Jaya

